

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam masyarakat Indonesia secara historis musik berperan penting dan berfungsi sebagai medium yang ampuh untuk mengekspresikan pesan-pesan sosial dan politik. Dalam mengekspresikan pesan tersebut, musik dan lirik lagu menjadi salah satu bentuk ekspresi yang memiliki kemampuan unik untuk menangkap dan menyampaikan persepsi tentang keadaan sosial yang memengaruhi pikiran individu (Bagaskara & Kusumalestari, 2023). Iswantara mengatakan bahwa musik telah menjadi alat untuk menyuarakan keprihatinan dan aspirasi masyarakat, serta sering kali bertindak sebagai penggerak perubahan sosial (Putra & Wafa, 2021).

Perubahan sosial dan politik di Indonesia telah memicu musisi untuk menggunakan musik mereka sebagai *platform* untuk mengomentari dan mengkritik berbagai aspek kehidupan di masyarakat (Adilah, 2021). Mengkritik melalui lagu secara spesifik telah menjadi cara yang populer dan efektif untuk menyuarakan ketidakpuasan dan mengajak pendengar untuk meresapi isu-isu krusial yang dihadapi oleh masyarakat. Lirik lagu seringkali ditulis dengan tujuan tertentu baik itu menyampaikan pesan, mengkritik, atau mengenang peristiwa penting dalam kehidupan penulis lagu atau masyarakat (Martinus & Aisyah, 2020). Dengan menggunakan nuansa metafora, simbolisme, dan narasi yang ringkas, lirik dalam sebuah lagu mampu merangkum kompleksitas realitas sosial dan politik sehingga menjadi medium yang efektif untuk menyampaikan kritik yang tajam dan menggugah kesadaran masyarakat agar lebih kritis dalam melihat realitas.

Muzakka (2019) menjelaskan bahwa kritik sosial dalam musik menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia, di mana isu-isu seperti ketidakadilan, korupsi, dan kesenjangan sosial masih menjadi perhatian utama. Kombinasi musik dan aktivisme sosial atau kritik sosial telah

berfungsi sebagai cara yang efektif untuk berkomunikasi, di mana para musisi memanfaatkan *platform* musik mereka untuk melawan pemerintahan yang otoriter dan mendorong reformasi sosial. Artis seperti Iwan Fals melalui lagu “Demokrasi Nasi” dan Slank “Gossip Jalanan” secara eksplisit mengkritik pemerintahan dan ketidakadilan dengan gaya bahasa yang lugas dan mudah dicerna masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana musik dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mengartikulasikan pandangan kritis terhadap kekuasaan.

Musisi di Indonesia telah lama berada di garis depan aktivisme sosial dan politik, mereka menggunakan musik untuk menyuarakan ketidakadilan dan mengadvokasi perubahan. Sebagai seniman dan aktivis, para musisi menghadapi berbagai tantangan, termasuk sensor, intimidasi, dan bahkan pemenjaraan, meski kadang sama sekali tidak berhubungan dengan lirik lagunya melainkan karena alasan politis semata seperti yang terjadi pada Koes Bersaudara di tahun 1965 (Rega, 2023).



**Gambar 1.1 Album Iwan Fals**

(sumber: (Nuri, 2024))

Darmawan dalam Alexander & Sugiono (2021) mengatakan bahwa, ekspresi perlawanan politik melalui medium musik juga ditunjukkan oleh

para musisi yang dikenal dengan nama panggung Iwan Fals. Karya musiknya cenderung disampaikan secara lebih lugas dan tajam dibandingkan dengan musisi lain dari generasi yang sama. Tema-tema yang diangkat dalam lagu-lagunya meliputi protes terhadap ketidakadilan sosial, penindasan, serta kritik terhadap kebijakan dan praktik-praktik kotor pemerintahan yang saat itu sedang berkuasa. Pada masa rezim Orde Baru aparat pemerintah beberapa kali menolak memberikan izin pertunjukan bagi Iwan Fals, dengan alasan bahwa konsernya dapat memicu kerusuhan. Ketika banyak musisi lain memilih menghindari akibat pencekalan yang dilakukan oleh penguasa, Iwan Fals justru tetap menunjukkan keberaniannya untuk tampil di panggung dan menyuarakan kritik sosial melalui lagu-lagu yang mengkritik pemerintah. Pada tahun 1980-an, sejumlah konsernya sempat mengalami sabotase, antara lain melalui pemadaman listrik secara tiba-tiba, sebagai respons terhadap lagu-lagu yang secara satir menyentil pemerintahan yang sedang berkuasa (Cermati, 2019). Pembungkaman juga terjadi tidak saja pada para musisi, tapi juga pada seniman lukis seperti terjadi pada Semsar Siaahaan dan Yos Suprpto baru-baru ini (Kurniawan, 2025).



**Gambar 1.2 Pameran Yos Suprpto Mendadak Dibatalkan**

(sumber: Tempo, 2024)

Iwan Fals menyampaikan kritik terhadap rezim Orde Baru melalui penggunaan simbol dan perumpamaan dalam lagu-lagunya, seperti "Tikus-Tikus Kantor" dan "Ambulans Zig-Zag". Dalam lagu "Tikus-Tikus Kantor", misalnya, simbol tikus dimaknai ulang untuk merepresentasikan para pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi. Pesan-pesan dalam musik protes Iwan Fals disampaikan secara tegas dan terbuka, meskipun dibalut dengan simbolisme atau perumpamaan. Pendekatan ini membuat makna lirik-lirik lagunya tetap mudah dipahami oleh masyarakat luas (Wiyanti, 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa musik tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan semata, melainkan juga sebagai wahana perjuangan ideologis dan sosio-politis, bahkan dimanfaatkan oleh pihak penguasa (Aditia, 2023). Para musisi itu yang berperan sebagai agen perubahan dan berani mengambil risiko mengartikulasikan aspirasi masyarakat dan mengkritik kebijakan yang dianggap merugikan.

Menurut Kennedy dan Kennedy dalam Wiyanti (2024), musik protes merupakan bentuk ekspresi musikal yang digunakan untuk menyuarakan ketidakadilan, baik dalam ranah sosial maupun politik, serta sebagai respons terhadap peristiwa-peristiwa yang memicu keterlibatan emosional publik. Musik ini umumnya terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni lagu-lagu yang bernuansa politik berfokus terhadap kebijakan pemerintah, dan lagu-lagu yang menitikberatkan pada ketidakadilan yang dialami oleh kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat (Henwood, 2017).

Kebijakan pemerintah dalam hal kebebasan berekspresi melalui musik menjadi fokus perhatian bagi para seniman dan aktivis. Kebijakan tersebut menentukan sejauh mana musisi dapat menggunakan *platform* mereka untuk menyampaikan kritik sosial dan mendorong perubahan. Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No.12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights), menyebutkan bahwa hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat mencakup hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan

memberikan informasi dan pemikiran, terlepas dan pembatasan secara lisan, tertulis, maupun dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain. Ketentuan ini merupakan hak konstitusional setiap warganegara dan menjadi landasan bagi hak kebebasan berekspresi bagi musisi sebagaimana dijamin dalam pasal 27 dan 28 UUD Negara Republik Indonesia (Utami & Gischa, 2022). Undang-Undang ini menjadi landasan kebebasan berekspresi bagi musisi, namun demikian fakta dilapangan sejak rezim Soekarno dan Soeharto sampai saat ini di era pasca Reformasi masih banyak terjadi pembungkaman.

Efek samping dari tindakan sensor dan pembungkaman tersebut, dimana sebuah informasi yang semula kurang diketahui publik kemudian menjadi viral dan diperbincangkan secara luas akibat penyensoran yang dilakukan dan hal ini biasanya dikenal sebagai *Streisand Effect* (Petithomme et al., 2024). Penyensoran oleh pemerintah dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi para musisi yang menyuarakan isu-isu sosial di Indonesia. Dengan membatasi distribusi musik, pemerintah dapat membatasi jangkauan dan dampak dari para seniman. Paradoksnya adalah penyensoran dapat memicu *Streisand Effect* di mana tindakan tersebut justru memicu keingintahuan dan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu yang disensor dan memperkuat dukungan terhadap musisi yang bersuara lantang.

Selain pembatasan oleh negara, sensor datang dari pemilik kapital, dimana para pemilik kapital dalam industri musik hanya ingin mempromosikan karya seni dengan selera pasar atau tidak mengganggu kepentingan ekonomi dan politik pemilik modal tersebut. Hal ini menyebabkan banyak musisi memilih jalur independen atau *indie* sebagai bentuk perlawanan terhadap komersialisasi musik dan mempertahankan kebebasan kreatif mereka. Kemunculan dan evolusi musik independen di Indonesia merupakan sebuah proses kompleks yang mencerminkan kombinasi dinamis antara transformasi sosial, pergolakan politik, perkembangan ekonomi, dan inovasi teknologi yang membentuk lanskap musik kontemporer Indonesia (Aji et al., 2021).

Musik independen di Indonesia memiliki asal-usul yang berakar kuat pada ranah *underground* pada dekade 1990-an (Resmadi & and Baulch, 2024). Di Indonesia musik *indie* telah menjadi kekuatan yang masif, menawarkan wadah bagi para musisi untuk menyuarakan pandangan mereka tanpa batasan dari label rekaman besar (Maulana, 2023). Aji et al (2021) menekankan bahwa musik *indie* memungkinkan musisi untuk bereksperimen dengan suara dan lirik yang berbeda, sehingga menembus batas-batas ekspresi dengan demikian memperkaya artistik dan dapat menyuarakan kritik sosial dengan keberanian. Banyak musisi *indie* menggunakan musik mereka sebagai sarana untuk mengkritik masalah sosial, politik, dan lingkungan hidup yang tidak dapat diangkat sebagai fokus utama oleh media-media *mainstream*.

Lirik lagu dalam musik *indie* menjadi senjata utama untuk menyampaikan pesan perlawanan dan kritik sosial tanpa batas. Lirik lagu “Bayar Bayar Bayar” karya band Sukatani, menjadi salah satu contoh bagaimana musik dapat digunakan sebagai alat untuk mengkritik masalah sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Band *indie* asal Purbalingga, Jawa Tengah ini secara langsung mengkritik praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian (Rosa, 2025).

Lagu “Bayar Bayar Bayar” dengan cepat mendapatkan popularitas di kalangan masyarakat, dan bagi para aktivis melihatnya ini sebagai seruan untuk perubahan. Sejak perilisan album Gelap Gempita, Sukatani telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah pendengar di layanan streaming nasional. Data menunjukkan profil mereka kini mencatat lebih dari 204 ribu pendengar bulanan di Spotify. Lagu "Gelap Gempita" telah diputar lebih dari 1,9 juta kali, sementara itu lagu "Bayar Bayar Bayar", sudah ditarik dari *platform* dan tidak ditemukan sudah berapa kali diputar sebelum lagu tersebut viral (Spotify, 2025). Keberhasilan Sukatani juga terlihat dari peningkatan pengikut di media sosial dengan akun Instagram resmi mereka @sukatani.band mencapai sekitar 249 ribu *followers* dan 40 ribu likes dalam postingan *Instagram feed*. Capaian angka ini memperlihatkan bahwa



popularitas Sukatani berasal dari jumlah pendengar yang secara konsisten mendengarkan karya-karya mereka dan ini mengindikasikan adanya loyalitas basis penggemar yang kuat terhadap musik dan pesan yang dibawakan, bukan sekedar karena viral pasca video klarifikasi.

Sukatani bermula sebagai duo band *punk* jalanan di Purbalingga pada akhir 2022. Al (gitaris) dan Ovi (vokalis) keduanya merupakan pengamen yang aktif di komunitas tani. Album perdana mereka, *Gelap Gempita*, yang rilis setahun kemudian tepatnya 24 Juli 2023, menempatkan lagu "Bayar Bayar Bayar" sebagai hymne anti-pungli. Lirik yang vulgar namun jujur itu cepat meresonansi hingga festival nasional, menunjukkan pergeseran kritik sosial dari ruang *underground* ke *mainstream*. Sejak pertengahan 2024, keberadaan intel terlihat di setiap panggung mereka. Dalam pernyataan resmi Band Sukatani pada tanggal 1 Maret 2025 mengungkapkan bahwa mereka telah mengalami tekanan dan intimidasi sejak bulan Juli 2024, termasuk pemanggilan, interogasi, dan bentuk tekanan psikologis lainnya (Hayati, 2025). Puncaknya pada 20 Februari 2025, memperlihatkan wajah mereka tanpa topeng *balaclava*. Mereka menjalani interogasi panjang di Polda Jateng dan dipaksa membuat video klarifikasi. Dalam waktu singkat, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2025 lagu mereka ditarik dari platform digital, dan Ovi kehilangan pekerjaannya sebagai guru (Grehenson, 2025). Walaupun Kapolri mencoba merangkul melalui tawaran simbolik yaitu menjadi Duta Polisi, Sukatani tetap konsisten pada jalur musiknya. Kisah mereka menggambarkan dialektika antara musik protes, represi negara, dan daya tahan komunitas, menjadi studi kasus penting tentang bagaimana suara pinggiran dapat menantang struktur kekuasaan sambil mengundang dialog mengenai batas kebebasan budaya di Indonesia saat ini (Jaluardi, 2025).

Respons publik terhadap represi ini sungguh diluar dugaan. Tanggal 21 Februari 2025, lagu "Bayar Bayar Bayar" menjadi *anthem* dalam demonstrasi nasional Indonesia Gelap. Ribuan mahasiswa dan demonstran yang lainnya bernyanyi bersama menyanyikan lagu tersebut di tengah aksi unjuk rasa di Jakarta (Khoirunikmah, 2025). Empat hari berselang bahwa

Polda Jawa Tengah menyelidik enam anggota polisi atas dugaan intimidasi terhadap Band Sukatani setelah pertemuan di Banyuwangi. Pertemuan tersebut meminta klarifikasi atas lagu “Bayar Bayar Bayar” yang beredar luas di *platform* musik digital (Setiawanty, 2025).

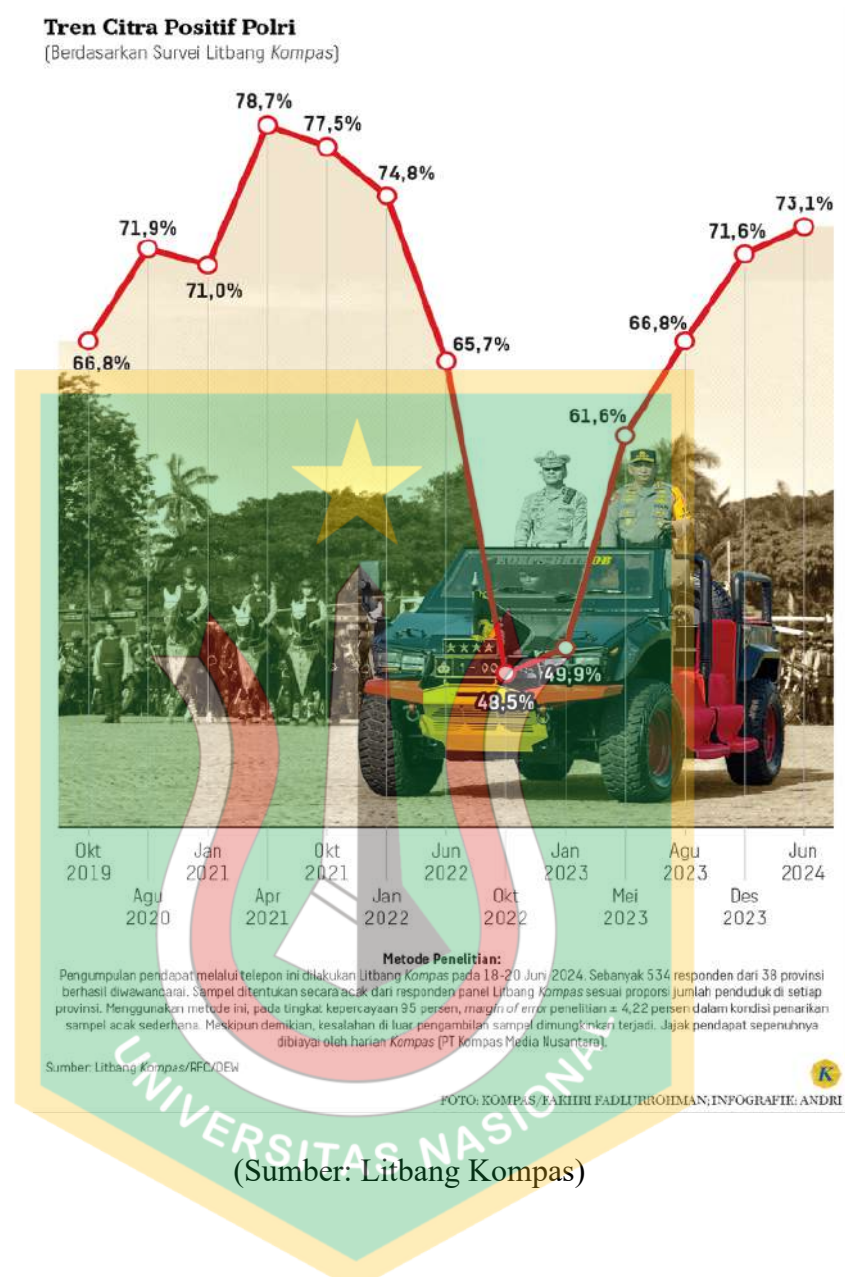
Lagu ini menjadi menjadi seruan bagi mereka yang tertindas, menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang berkuasa. Menyebarkan seperti api, menjadi lagu kebangsaan bagi mereka yang mencari keadilan, beresonansi dengan mereka yang lelah dibungkam dan menjadi suara bagi mereka yang tak mampu bersuara.

Kritik dan bahkan gugatan terhadap institusi Kepolisian kerap dilakukan namun perbaikan signifikan tidak terjadi. Pungutan liar itu tetap berjalan bahkan seperti dinormalkan. Kalau terjadi trend membaik namun tidak lama kemudian terjadi penurunan dan kemudian terjadi kenaikan kembali. Survey Litbang Kompas tahun 2024 (Jati, 2024) menunjukkan fenomena ini sebagaimana tampak dalam gambar 1.3.

Citra institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi yang signifikan. Secara umum, rentang waktu tahun 2019–2020 citra Polri menunjukkan tren positif, bahkan sempat mencapai tingkat kepercayaan publik yang cukup tinggi. Program reformasi internal Polri, seperti Program Promoter di era Kapolri Jenderal Tito Karnavian (2016–2019), berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan survei Litbang Kompas tahun 2017, Polri yang sebelumnya berada di posisi bawah dalam hal kepercayaan publik berhasil naik ke posisi tiga besar dengan tingkat kepercayaan sekitar 72%, di bawah TNI dan KPK (Wikipedia, 2025). Tren positif ini berlanjut hingga awal 2020-an, di mana Litbang Kompas mencatat bahwa citra positif Polri konsisten berada pada kisaran angka 70% sepanjang Agustus 2020 hingga Januari 2022 (Santika, 2023).



Gambar 1.3 Tren Citra Positif Polri 2019 – 2024



Setelah periode tersebut, citra Polri mengalami pasang surut, terutama dipengaruhi oleh sejumlah isu besar yang menyita perhatian nasional. Survei Litbang Kompas menunjukkan puncak citra positif Polri pada bulan April 2021 sebesar 78,7%. Pencapaian ini dikaitkan dengan peran aktif Polri dalam penanganan pandemic Covid-19 pada saat itu. Kapolri pada saat itu adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang terjun langsung mendukung kebijakan pembatasan sosial, distribusi bantuan,

serta upaya mitigasi pandemi, sehingga mendapatkan apresiasi publik (Santika, 2023).

Sebagaimana terlihat pada gambar grafik di atas, penurunan citra Polri semakin turun tajam memasuki tahun 2022. Survei Litbang Kompas menunjukkan citra positif Polri turun drastis ke angka kisaran 65% pada Juni 2022. Puncak kemerosotan terjadi pasca serangkaian kasus besar yang mencuat pada pertengahan tahun 2022. Pada bulan Agustus 2022, citra positif Polri kian turun menjadi 54,4%. Bahkan, di bulan Oktober 2022, citra positif Polri mencatatkan titik terendahnya yaitu di angka 43%. Artinya mayoritas masyarakat atau publik saat itu memiliki persepsi negative terhadap kinerja dan integritas Polri. Penurunan citra positif ke titik 43% ini menandai krisis kepercayaan masyarakat yang paling serius dalam kurun 3-5 tahun terakhir.

Pada akhir tahun 2022 hingga 2023, citra Polri berangsur pulih seiring berbagai langkah pemulihan kepercayaan yang dilakukan oleh institusi Polri. Survei Litbang Kompas menunjukkan pada bulan Januari 2023, mencatatkan kenaikan kembali mendekati ke angka 50%. Tren pemulihan ini semakin jelas terlihat pada pertengahan tahun 2023. Litbang Kompas edisi bulan Mei 2023 melaporkan 61,6% responden menilai citra Polri baik, naik sekitar 11,7% dibanding survei yang dilakukan pada bulan Januari 2023. Peningkatan ini cukup naik signifikan yang menjadikan Polri sebagai salah satu Lembaga dengan kenaikan citra tertinggi di antara lembaga negara lainnya pada periode yang sama. Tren positif berlanjut hingga akhir 2023, di mana survei Kompas mencatat 66,8% citra positif Polri pada bulan Agustus 2023 dan meningkat lagi menjadi 71,6% pada bulan Desember 2023. Menjelang hari ulang tahun Bhayangkara pada tanggal 1 Juli 2024, citra positif Polri mencapai 73,1% di bulan Juni 2024. Angkat tersebut mendekat kondisi saat sebelum krisis citra polisi tahun 2022 yang menempatkan Polri Kembali sebagai salah satu institusi publik teratas dalam hal citra positif diantara lembaga tinggi negara lainnya yang hanya satu posisi dibawah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Data dari survei Litbang Kompas di atas menunjukkan fluktuasi yang cukup ekstrem. Tren citra positif tertinggi sekitar 78% pada tahun 2021, kemudian turun tajam ke titik terendahnya di 43% di akhir tahun 2022, lalu naik kembali ke kisaran 70% lebih di tahun 2024.

Perubahan citra yang drastis tersebut, dalam sejarah sosial politik Indonesia, kerap kali beriringan dengan munculnya tindakan represi terhadap tokoh atau kelompok yang berani menyuarakan kritik, seperti yang kemudian menimpa Band Sukatani. Mereka mengalami berbagai bentuk tekanan dan intimidasi, mulai dari pembatalan pertunjukan secara sepihak, ditariknya lagu “Bayar Bayar Bayar” dari *platform* musik *Apple Music* dan *Spotify*, hingga harus membuka topeng dan meminta maaf kepada Kapolri dan Institusi Polri (Maharani, 2025).

Secara normatif, Institusi Polri seharusnya memelihara citra sebagai pelindung masyarakat, penegak hukum, dan pengayom masyarakat yang humanis. Namun realitasnya dilapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat justru membentuk citra yang berbeda. Polisi melakukan pungutan liar, represif, dan bahkan menjadi simbol ketidakadilan. Kesenjangan antara kondisi ideal polisi sebagai pengayom masyarakat dengan realitas polisi dipersepsikan korup inilah yang menjadi masalah krusial.

Untuk memahami fenomena ini perlu dibahas konsep citra (*image*). Citra dipahami sebagai persepsi publik yang terbentuk melalui interaksi kompleks antara pengalaman, keyakinan, emosi, dan simbol. Philip Kotler dalam Agung (2024) mendefinisikan citra sebagai sekumpulan keyakinan, gagasan, dan kesan yang terbentuk dalam diri individu terhadap suatu objek. Objek yang dimaksud bisa berupa individu, kelompok, organisasi, maupun entitas lainnya. Apabila objek tersebut adalah sebuah organisasi, maka seluruh keyakinan, pemikiran, dan kesan yang dimiliki seseorang mengenai organisasi tersebut membentuk apa yang disebut sebagai citra organisasi. Citra bersifat multidimensional yang menyentuh aspek kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan), dan konatif (tindakan). Katz dalam

Soemirat & Ardianto, (2016) menegaskan bahwa citra adalah bagaimana pihak eksternal memandang perusahaan, individu, organisasi, atau aktivitas tertentu. Frank Jefkins dalam Filayly & Ruliana, (2022) menyajikan pengelompokan citra yang relevan untuk kasus ini. Ia membedakan antara *wish image* yaitu citra ideal yang ingin ditampilkan lembaga dengan *current image* yakni citra aktual yang ada di benak masyarakat. Dalam konteks Polri, *wish image*-nya adalah polisi profesional, humanis, dan transparan. Namun *current image* yang tercermin dalam lagu Sukatani adalah polisi korup, pemeras, dan represif. Kesenjangan atau *gap* inilah yang menjadi sumber krisis.

Kesenjangan citra memiliki konsekuensi yang serius. Pertama, ia melemahkan legitimasi Polri sebagai institusi penegak hukum. Masyarakat yang tidak percaya pada polisi akan cenderung mencari mekanisme informal, misalnya menyelesaikan masalah melalui jalur kekerasan atau “jalan belakang”. Kedua, representasi negatif yang terus menerus diproduksi dalam budaya populer dapat membentuk mitos sosial yang mengakar bahwa polisi selalu meminta uang dalam setiap interaksi. Ketiga, ketidakmampuan institusi mengelola citra membuka ruang untuk mengambil alih narasi, seperti yang dilakukan oleh Band Sukatani. Di titik inilah urgensi penelitian ini muncul. Analisis semiotika Roland Barthes diperlukan untuk membongkar bagaimana lirik lagu “Bayar Bayar Bayar” membentuk makna melalui denotasi, konotasi, dan mitos. Analisis ini akan memperlihatkan bagaimana citra polisi dikonstruksi dalam teks budaya populer, serta apa implikasinya bagi relasi masyarakat dengan aparat.

Penelitian mengenai kritik sosial melalui lagu telah banyak dilakukan, terutama konteks musik sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis lirik lagu sebagai representasi semiotik atas praktik korupsi dan pungutan liar di kepolisian masih terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada analisis lirik lagu sebagai bentuk ekspresi budaya atau identitas kelompok tertentu. Penelitian mengenai analisis semiotika

dengan menggunakan teori Roland Barthes dalam konteks lirik lagu yang mengkritik institusi kepolisian masih jarang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi citra Polisi dalam lirik lagu “Bayar Bayar Bayar” dan akan mendeskripsikan bagaimana lirik lagu “Bayar Bayar Bayar” tersebut mengkonstruksi makna dan menyampaikan kritik sosial melalui denotasi, konotasi, dan mitos. Penelitian ini penting dilakukan atas dua alasan: (1) memberikan wawasan baru tentang lirik musik, khususnya band *indie* yang bergenre *punk*, berperan sebagai alat kritik sosial. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori semiotika, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika sosial yang dihadapi kelas menengah ke bawah, kemudian (2) juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mendukung kebebasan berekspresi dan pemajuan budaya.

Urgensi dan penelitian ini penting untuk dilakukan. Analisis semiotika Roland Barthes terhadap lagu “Bayar Bayar Bayar” dapat mengungkap bagaimana lirik tersebut menyusun tanda-tanda, membangun konotasi, dan mereproduksi mitos yang membentuk representasi citra polisi. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam kajian semiotika dan teori citra, tetapi juga relevan secara praktis bagi institusi Polri untuk memahami bagaimana publik memaknai mereka dalam ruang budaya populer. Dengan memahami konstruksi citra yang lahir dari teks musik, Polri dapat merumuskan strategi komunikasi dan reformasi yang lebih tepat dalam memperbaiki kepercayaan publik. adalah mengingat maraknya kasus korupsi dan pungutan liar yang melibatkan oknum kepolisian. Lagu tersebut merupakan resonansi dari suara masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik-praktik tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih jauh tentang lagu “Bayar Bayar Bayar” karya Band Sukatani tersebut dengan tajuk penelitian yang berjudul:

## REPRESENTASI CITRA POLISI DALAM LAGU “BAYAR BAYAR BAYAR” KARYA BAND SUKATANI. (ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES)

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana representasi citra polisi dimaknai dalam lirik lagu “Bayar Bayar Bayar” karya band Sukatani berdasarkan analisis semiotika Roland Barthes?”

Pertanyaan tersebut mencakup tiga aspek turunan: (1) makna denotasi apa yang muncul dalam lirik terkait citra polisi, (2) makna konotasi atau pesan implisit apa yang tersirat mengenai polisi, dan (3) mitos apa yang dibangun melalui representasi polisi dalam lagu tersebut. Ketiga aspek ini akan dijawab melalui pendekatan semiotika dua tahap Roland Barthes (dua level signifikasi: denotatif dan konotatif-mitos).

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan makna denotatif yang terkandung dalam lirik lagu “Bayar Bayar Bayar” terkait citra polisi, yakni makna lugas atau apa adanya dari teks lirik.
2. Menganalisis makna konotatif yang tersirat dari lirik lagu tersebut tentang citra polisi, yaitu makna tambahan, emosional, atau nilai-nilai yang di asosiasikan dengan polisi melalui ungkapan lirik.
3. Untuk mengungkap mitos yang membingkai representasi citra polisi dalam lagu “Bayar Bayar Bayar”, yaitu pandangan masyarakat apa yang dilekatkan atau dipertanyakan terkait polisi melalui lagu ini.



## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis:

### 1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Memajukan bidang ilmu komunikasi, khususnya dalam studi semiotika.
2. Memahami metodologi semiotika Roland Barthes dalam analisis karya musik.
3. Mengembangkan khazanah analisis kritik sosial dalam musik kontemporer Indonesia.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan referensi bagi mahasiswa komunikasi dan jurnalistik dalam melakukan penelitian yang serupa.
2. Membantu masyarakat dan penikmat musik untuk lebih memahami makna dan pesan yang terkandung dalam lirik lagu.
3. Memberikan masukan terhadap institusi Kepolisian untuk memahami persepsi publik (citra) yang berkembang di masyarakat melalui medium lagu, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi komunikasi institutional di kemudian hari.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab dengan struktur sebagai berikut:

### BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah yang mendasari penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoretis dan praktis), batasan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan. Bagian pendahuluan memberikan gambaran awal mengenai pentingnya penelitian dan ruang lingkupnya,

## BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Disajikan pembahasan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya terkait analisis semiotika Roland Barthes dalam lima tahun terakhir beserta *research gap* yang ada. Kemudian dijelaskan konsep-konsep teoretis yang menjadi pijakan, meliputi teori semiotika umum, teori semiotika Roland Barthes (denotasi, konotasi, mitos), konsep musik atau lagu sebagai teks budaya, serta teori pendukung mengenai citra dan representasi. Di akhir Bab II, dipaparkan kerangka pemikiran yang menjelaskan alur logis penelitian ini.

## BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mencakup paradigma dan pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode atau strategi analisis (analisis semiotika Barthes), objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab III memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## BAB IV : Pembahasan

Bab ini akan memuat hasil analisis terhadap lirik lagu “Bayar Bayar Bayar” menggunakan metode yang telah ditetapkan. Setiap temuan pada level denotasi, konotasi, dan mitos akan disajikan disertai pembahasan yang mengaitkannya dengan teori serta konteks representasi citra polisi.

## BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian, yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Juga disertakan implikasi temuan, keterbatasan penelitian yang dihadapi, serta saran untuk penelitian mendatang atau rekomendasi praktis jika ada